

**RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
DINAS KETAHANAN PANGAN
TAHUN 2016 - 2021
(PERUBAHAN)**



**Kabupaten Tanjung Jabung Barat
Tahun 2019**

KATA PENGANTAR

Dalam rangka menetapkan arah dan acuan pelaksanaan pembangunan ketahanan pangan di Provinsi Jambi dan khususnya di Kabupaten Tanjung Jabung Barat, menindak lanjuti hasil evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah tentang Rencana Strategis Pemerintah Daerah Provinsi Jambi, maka disusunlah Rencana Strategis Perubahan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016-2021 yang berisikan tentang visi dan misi, tujuan, sasaran, kebijakan, strategi, program dan kegiatan. Pelaksanaanya dirancang selama 5 (lima) tahun sekaligus dirumuskan indikator keberhasilannya, sehingga bahan perbaikan rencana pelaksanaan program tahun berikutnya.

Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat sesuai tugas pokok dan fungsinya memiliki Program Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat yang mencakup tiga kegiatan utama yaitu: (1) Pengembangan Ketersediaan Pangan dan Penanganan Kerawanan Pangan; (2) Pengembangan Sistem Distribusi dan Stabilitas Harga Pangan: serta (3) Pengembangan Penganekaragaman Konsumsi Pangan dan Peningkatan Keamanan Pangan Segar. Ketiga kegiatan utama tersebut pada dasarnya untuk melanjutkan kegiatan sebelumnya, dengan penyempurnaan dan pementapan secara terpadu dan terkoordinir yaitu: Pengembangan Desa Mandiri pangan di daerah sentra pangan, serta Pemberdayaan Cadangan Pangan Masyarakat dan Cadangan Pangan Pemerintah. Pada sisi lain direncanakan akan didorong lebih cepat dan berkelanjutan, termasuk didalamnya aspek keamanan pangan segar. Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran pembangunan Ketahanan Pangan tersebut, koordinasi kebijakan dan program ketahanan pangan dilaksanakan dengan mengoptimalkan peran Dewan Ketahanan Pangan beserta Instansi terkait lainnya.

Renstra Perubahan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tanjung Barat Tahun 2016-2021 ini diharapkan menjadi pedoman untuk melaksanakan Pembangunan Ketahanan Pangan di Provinsi Jambi khususnya di Kabupaten Tanjung Jabung Barat sesuai dengan potensi yang dimiliki. Semoga Allah SWT selalu memberikan petunjuk dan bimbingan dalam upaya pencapaian ketahanan pangan yang mantap dan berkelanjutan.

Kuala Tungkal, 20 Mei 2019

Kepala Dinas Ketahanan Pangan
Kabupaten Tanjung Jabung Barat



H. ISUMAR, S.IP

Pembina Tk. I

NIP. 19660413 198708 1 001

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
BAB I	
PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	2
1.3. Maksud dan Tujuan	4
1.4. Sistematika Penulisan.....	4
BAB II	
GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	6
2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah.....	6
2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah.....	10
2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	12
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah.....	18
BAB III	
PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	21
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah	21
3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	21
3.3. Telaahan Renstra Kementerian.....	23
3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	24
3.5. Penentuan Isu isu Strategis	24
BAB IV	
TUJUAN DAN SASARAN	28
4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah.....	28
BAB V	
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN.....	29
BAB VI	
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN.....	31
BAB VII	
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN.....	34
BAB VIII	
PENUTUP.....	35

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pencapaian tujuan sesuatu organisasi yang dikelola secara moderen hanya dapat dicapai jika menerapkan fungsi-fungsi manajemen secara baik. Salah satu fungsi manajemen adalah fungsi perencanaan. Dalam sebuah organisasi Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat fungsi perencanaan dilaksanakan oleh Dinas Ketahanan Pangan Daerah (DKPD). Perencanaan di dalam sebuah organisasi secara umum dapat digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan kegiatan.

Perencanaan menurut dimensi waktu dapat dikelompokkan ke dalam perencanaan jangka panjang dan perencanaan jangka pendek. Perencanaan jangka panjang perlu disusun untuk dipedomani didalam penyusunan perencanaan jangka pendek, menyadari hal tersebut maka Dinas Ketahanan Pangan mengimplementasikan penyusunan perencanaan jangka panjang dalam sebuah dokumen perencanaan strategis. Tuntutan adanya pelaksanaan pemerintah yang lebih berdaya guna, berhasil dan bertanggung jawab.

Sesuai dengan peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 55 Tahun 2016 tentang uraian tugas pokok dan fungsi jabatan pada lembaga teknis Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Maka Dinas Ketahanan Pangan Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam menyiapkan bahan koordinasi untuk ketahanan pangan. Dinas Ketahanan Pangan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dituntut untuk mempunyai Rencana Strategis yang merupakan serangkaian program dan kegiatan mendasar, untuk diimplementasikan oleh seluruh komponen organisasi dalam rangka pencapaian tujuannya. Untuk itu perlu disusun Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang mengacu pada permendagri Nomor. 54 Tahun 2010 Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, dan tata cara penyusunan, pengendalian dan Evaluasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Renstra SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk priode 5 (lima) tahun. Didalam penyusunan Renstra ini harus sesuai dengan dan fungsi SKPD serta berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif. RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang merupakan penjabaran dari visi dan misi Kepala Daerah. Renstra berfungsi untuk menjabarkan secara operasional visi dan misi Kepala Daerah dan merupakan dokumen publik yang memberikan gambaran wujud pelayanan oleh SKPD hingga 5 (lima) tahun kedepan.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat adalah:

1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten di Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
2. Undang-undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomer 1999 Nomer 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomer 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomer 14 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomer 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
3. Undang-Undang Nomer 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang System Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44421);
5. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-undang Nomor 77 Tahun 2006 tentang Pangan
7. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

9. Peraturan pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah daerah provinsi dan Pemerintah daerah Kabupaten/kota
11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, tata cara penyusunan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
14. Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan Keuangan Daerah
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang perubahan kedua Atas Peraturan Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembagnunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
18. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.010/8/2016 tentang Pedoman Nomenklatur, Tugas dan Fungsi Urusan Pangan dan Dinas Urusan Pertanian Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1334);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 11 tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Tanjung Jabung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2011 Nomor 11);

20. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 3);
21. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 55 Tahun 2016 tentang susunan Susunan Organisasi dan Tata kerja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
22. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 2 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016 – 2021;

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Rencana Strategis Dinas Ketahanan pangan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat, adalah sebagai upaya mengarahkan seluruh dimensi dan potensi dari Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tanjung Barat, dengan cara mengintegrasikan antara kemampuan dari potensi sumber daya manusia dengan sumber daya alam lainnya, agar lembaga ini mampu bertanggung jawab terhadap tuntutan perkembangan Strategis dalam tatanan Regional , Nasional, maupun Global.

Tujuan disusunnya Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat agar Dinas Ketahanan Pangan dapat proaktif mengantisipasi perubahan yang terjadi, mendiagnosa secara objektif, keberhasilan yang dicapai dengan berwawasan kemasa depan, melaksanakan pelayanan prima dengan memfasilitasi dan partisipasi pelaku (Stakeholder), serta fleksibel melakukan antisipasi terhadap berbagai perubahan yang terjadi.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan rencana strategis Dinas Ketahanan Pangan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat antara lain :

BAB I . PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II. GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

- 2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah
- 2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah
- 2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERINGKAT DAERAH

- 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah
- 3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih.
- 3.3 Telaahan Renstra Kemetrian dan Renstra Provinsi/Kabupaten
- 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan hidup Strategis.
- 3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis

BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN

- 4.1 Tujuan dan Sasaraan Jangka Menengah Perangkat Daerah

BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, SERTA PENDANAAN

BAB VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VIII. PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERINGKAT DAERAH

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Dinas Ketahanan Pangan Daerah mempunyai tugas mengkoordinir, merumuskan, mengatur, membina, mengendalikan, mengkoordinasikan dan mempertanggung jawabkan kebijakan teknis penyusunan dan melaksanakan kebijakan daerah di bidang pemantapan ketahanan pangan daerah. Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Ketahanan Pangan berdasarkan Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 55 tahun 2016 tentang susunan organisasi dan tata kerja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat terdiri dari :

1. KEPALA DINAS

Bertugas membantu Bupati Tanjung Jabung Barat dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepala Daerah di bidang pangan.

Dinas ketahanan Pangan dalam melaksanakan tugas tersebut menyelenggarakan fungsi sebagaimana berikut:

- a. Perumusan kebijakan dibidang Ketersediaan Pangan dan kerawanan Pangan, Distribusi dan Cadang Pangan, Konsumsi dan keamanan Pangan;
- b. Pelaksanaan kebijakan dibidang Ketersediaan Pangan dan kerawanan Pangan, Distribusi dan Cadang Pangan, Konsumsi dan keamanan Pangan;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang Ketersediaan Pangan dan kerawanan Pangan, Distribusi dan Cadang Pangan, Konsumsi dan keamanan Pangan;
- d. Pelaksanaan administrasi dinas dibidang Ketersediaan Pangan dan kerawanan Pangan, Distribusi dan Cadang Pangan, Konsumsi dan keamanan Pangan;
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

2. SEKRETARIAT

Sekretariat berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dan dipimpin oleh seorang sekretaris, sekretariat mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada seluruh unit kerja di lingkungan Dinas Ketahanan Pangan. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 8, Sekretariat menyelenggarakan fungsi :

- a. koordinasi penyusunan rencana, program, anggaran dan pelaporan;
- b. pembinaan dan penyelenggaraan urusan umum dan keuangan meliputi : ketatausahaan, kepegawaian, penatausahaan aset dan perlengkapan, kerja sama, hubungan masyarakat, kearsipan, perbendaharaan, akutansi, verifikasi dan tindak lanjut LHP;

- c. Koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan;
- d. Pengelolaan barang milik/kekayaan negara; dan
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. BIDANG KETERSEDIAAN DAN KERAWANAN PANGAN

Bidang ketersediaan dan kerawanan pangan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Dalam melaksanakan tugas kelompok Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan dipimpin oleh kepala bidang. Bidang Ketersediaan Pangan dan Kerawanan Pangan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan, perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, dan pemberian pendampingan serta pemantauan dan evaluasi di bidang ketersediaan pangan dan kerawanan pangan. Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut Kepala Bidang Ketersediaan Pangan dan Kerawanan pangan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan, pelaksanaan dan evaluasi serta pelaporan program dan rencana kerja dibidang Ketersediaan Pangan dan Kerawanan Pangan;
- b. penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi ketersediaan pangan, penyediaan infrastruktur pangan dan sumberdaya pendukung ketahanan pangan lainnya;
- c. penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitas, koordinasi, pemantauan dan evaluasi penanganan kerawanan pangan, penyiapan bahan intervensi daerah rawan pangan dan sistem kewaspadaan pangan dan gizi;
- d. pemberian pendampingan pelaksanaan kegiatan dibidang, ketersediaan pangan, penanganan kerawanan pangan dan koordinasi penyediaan infrastruktur pangan sumberdaya pendukung ketahanan pangan lainnya;
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4. BIDANG DISTRIBUSI DAN CADANGAN PANGAN

Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan dipimpin oleh Kepala Bidang. Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan mempunyai tugas Melaksanakan penyusunan rumusan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian pendampingan serta pemantauan dan evaluasi di bidang distribusi dan cadangan pangan. Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut Kepala Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan mempunyai fungsi:

- a. penyusunan pelaksanaan dan evaluasi serta pelaporan program dan rencana kerja dibidang distribusi pangan, dan cadangan pangan;

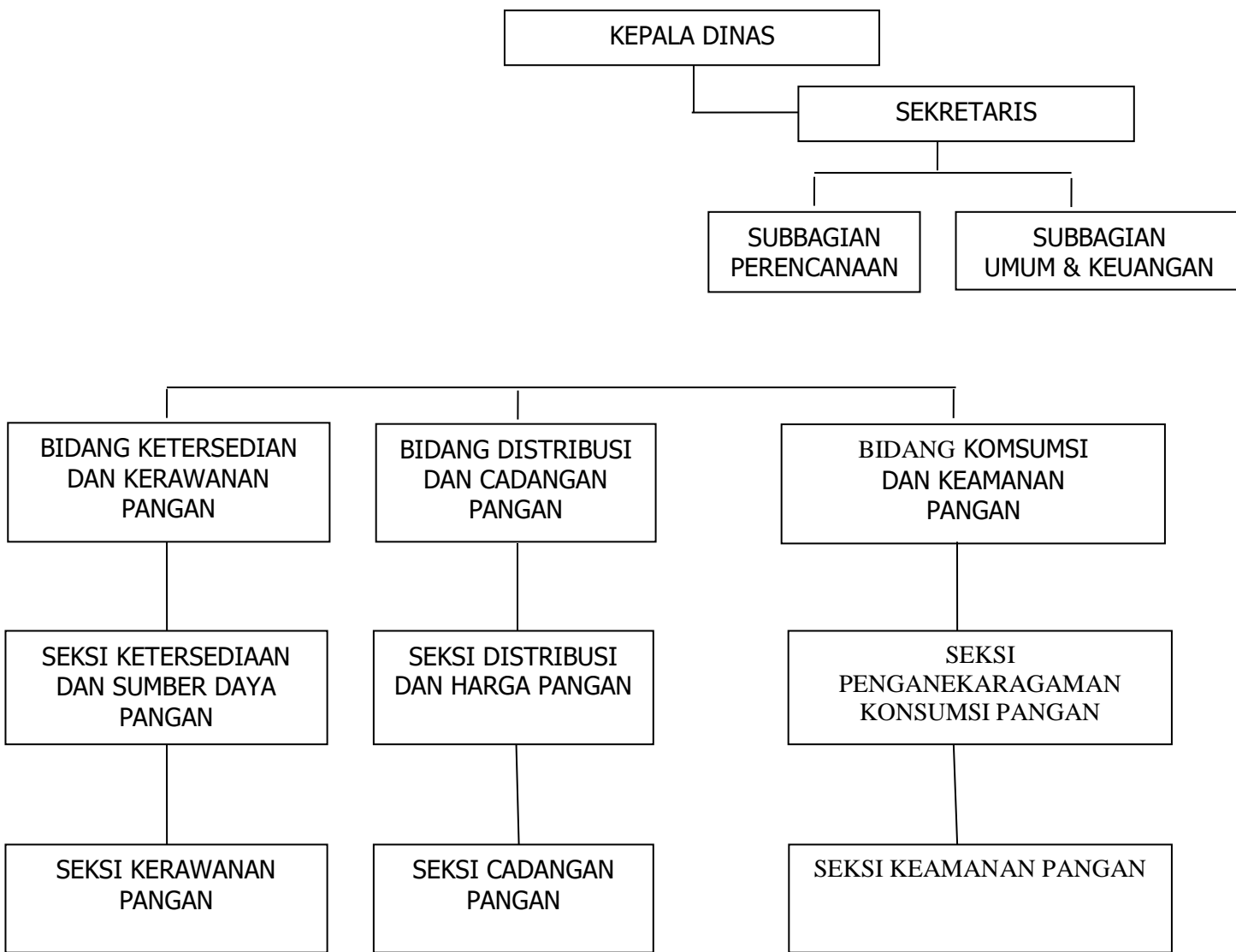
- b. penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi koordinasi, pemantauan dan evaluasi distribusi pangan dan pasokan harga, pengembangan kelembagaan distribusi pangan dan penyusunan prognosa neraca pangan;
- c. penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitas, koordinasi, pemantauan dan evaluasi cadangan pangan, pengadaan, pengelolaan dan penyaluran serta pemanfaatan cadangan pangan Pemerintah;
- d. pemberian pendampingan pelaksanaan kegiatan di bidang distribusi pangan, harga pangan, dan cadangan pangan;
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

5. BIDANG KONSUMSI DAN KEAMANAN PANGAN

Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan dipimpin oleh Kepala Bidang. Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana, perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi di bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan, pelaksanaan dan evaluasi serta pelaporan program dan rencana kerja di bidang konsumsi dan keamanan pangan;
- b. penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi promosi penganeekaragaman konsumsi pangan, pengembangan pangan lokal, ketahanan pangan keluarga, perhitungan perkomoditas, perkonsumsi energi dan protein masyarakat pertahun, dan kerja sama antar lembaga pemerintah, swasta dan masyarakat;
- c. penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitas, koordinasi, pemantauan dan evaluasi kelembagaan keamanan pangan, pengawasan keamanan pangan, dan kerja sama dan informasi keamanan Pangan;
- d. pemberian pendampingan pelaksanaan kegiatan dibidang konsumsi pangan, penganeekaragaman konsumsi pangan, dan keamanan pangan;
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI



2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

Sumber Daya Manusia (SDM) di Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat adalah sebagai berikut :

Untuk Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebanyak 22 orang, yang terdiri dari:

1. 1 (Satu) orang kepala Dinas.
2. 1 (satu) orang Sekretaris
3. 1 (satu) orang Kasubbag umum dan keuangan
4. 1 (satu) orang Kasubbag Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Program
5. 3 (tiga) orang kepala Bidang
6. 6 (Enam) orang Kepala Seksi
7. 9 (sembilan) orang sebagai staf atau Fungsional Umum

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Dinas Ketahanan pangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat juga dibantu oleh 15 orang tenaga Honorer/Kontrak (TKK). SDM Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat dapat dilihat dari berbagai macam tabel dibawah ini. Susunan Kepegawaian Organisasi Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat terdiri dari :

2.2.1 Susunan Kepegawaian

a. Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan dan Tingkat Pendidikan

NO	GO L	LAKI-LAKI						JM L	PEREMPUAN					JM L	TOTAL
		S.3	S.2	S.1	D.3	SLT A	SD		S.3	S.2	S.1	D.3	SLT A		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16=9+15
1	IA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	IB	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	IC	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ID	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	IIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	IIB	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	1
	IIC	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	1
	IID	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1
3	IIIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	IIIB	-	-	-	1	-	-	1	-	-	1	-	-	1	2
	IIIC	-	-	3	-	-	-	3	-	-	1	-	-	1	4
	IIID	-	1	-	1	-	-	2	-	-	6	1	-	7	9

4	IV A	-	-	1	1	-	-	2	-	-	-	-	-	-	2
	IV B	-	-	2	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	2
	IV C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	IV D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	IV E	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
JUMLAH		-	1	6	3	2	-	12	-	-	8	1	1	10	22

B. Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan dan Jenis Kelamin

NO	KETERANGAN PEGAWAI	GOLONGAN II			GOLONGAN III			GOLONGAN IV			TOTAL
		L K	PR	JML	LK	PR	JML	LK	PR	JML	
1.	PEJABAT STRUKTURAL	-	-	-	4	5	9	4	-	4	13
✓	JUMLAH	-	-	-	4	5	9	4	-	4	13
2.	PEJABAT FUNGSIONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
✓	JUMLAH	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.	PELAKSANA/STAF	2	1	3	2	4	6	-	-	-	9
✓	JUMLAH	2	1	3	2	4	6	-	-	-	9
4.	CPNS (CAPEG)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
✓	JUMLAH	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
JUMLAH KESELURUHAN		2	1	3	6	9	15	4	-	4	22

C. 2.2.2. Aset Peralatan Dinas

No	Nama Peralatan Dinas	Jumlah	Keadaan Baik/Rusak
1.	Meja Kerja	40 Buah	Baik 34 Rusak 6
2.	Kursi Kerja	63 Buah	Baik 54 Rusak 9
3.	Komputer	15 Unit	Baik 4 Rusak 11
4.	Printer	20 Unit	Baik 8 Rusak 12
5.	Papan Pengumuman	1 Buah	Baik semua
6.	Kendaraan R4 Mobil	3 Unit	Baik
7.	Kendaraan R2	12 Unit	Baik 11 Rusak 1
8.	Laptop	12 Unit	Baik 8 Rusak 4
9.	Jam dinding	6 Unit	Baik
10.	Sound System	1 Unit	Baik
11.	Mesin genset	1 Unit	Baik
12.	Filling kabinet	7 Unit	Baik
13.	Lemari Arsip	12 Unit	Baik
14.	Camera Digital	2 Unit	1 Baik, 1 Rusak
15.	AC	6 Unit	Baik 4 Rusak 2
16.	Infokus	1 Unit	Baik
17.	Mesin Feximile	1 Unit	Rusak 1
18.	Umbul-umbul	20 Buah	Baik
19.	Brangkas	1 Unit	Baik
20.	Mesin Photochopy Canon	1 Unit	Baik

2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.

Sasaran strategis yang ditetapkan dalam pemantapan ketahanan pangan pada Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat Tahun 2011-2015 meliputi: Ketersediaan energi dan protein, penurunan jumlah penduduk rawan pangan, penganeekaragaman konsumsi pangan dengan skor PPH, penurunan konsumsi beras, pengawasan keamanan pangan, pemantauan harga pangan, dan penanganan cadangan pangan pemerintah dan masyarakat. Perkembangan kinerja pemantapan ketahanan pangan periode 2011-2015 menunjukkan peningkatan kinerja yang lebih baik, kecuali penurunan jumlah penduduk rawan pangan tidak tercapai karena kualitas konsumsi pada kelompok penduduk dengan konsumsi energy dibawah 70% Angka Kecukupan Gizi, makin meningkat jumlahnya. Kinerja pelayanan perangkat daerah dapat dilihat di *lampiran pada tabel TC-23 dan TC-24*

a. Perkembangan Rata-Rata Ketersediaan Perkapita Perhari Energi dan Protein Tahun 2011 – 2015

Adapun gambaran ketersediaan bahan pangan untuk dikonsumsi dapat ditunjukkan dari hasil Neraca Bahan Makanan (NBM) yang dihitung berdasarkan penjumlahan produksi domestik, impor neto, perubahan stok, dikurangi kebutuhan nonkonsumsi untuk benih, industri nonpangan, dan penggunaan lainnya. Berdasarkan hasil analisis NBM dalam lima tahun terakhir periode 2011-2015, bahwa rata-rata kuantitas ketersediaan pangan perkapita perhari untuk energi mencapai 4.613 kilokalori dan protein 75,97 gram, sudah melebihi angka rekomendasi hasil Widya Karya Nasional Pangan dan Gizi (WKNPG) VIII untuk ketersediaan energi 2.400 kilokalori dan protein 63 gram. Pada periode tersebut, ketersediaan energi naik rata-rata 7,69 persen pertahun dan protein naik rata-rata 2,69 persen pertahun, karena pertumbuhan produksi relatif tinggi sedangkan volume impor menurun. Sumber ketersediaan protein masih didominasi dari bahan nabati, seperti tertera dalam berikut.

Tahun	Ketersediaan Perkapita Perhari			
	Energi (KKal)	Protein (Gram)		
		Nabati	Hewani	Total
2011	6.580	87,93	12,20	100,13
2012	5.918	74,34	12,00	86,34
2013	5.870	75,82	11,92	87,74
2014	5.017	56,05	24,76	80,81
2015	4.613	57,47	7,68	65,15
Pertumbuhan Pertahun (%)	7,69	1,70	7,83	2,69

Sumber data : Data masing masing instansi diolah DKP;

Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi peningkatan ketersediaan pangan pangan, program dan kegiatan Dinas Ketahanan Pangan tahun 2011-2015 diarahkan untuk memantapkan koordinasi dan sinergi kebijakan/program ketersediaan pangan, meliputi: peningkatan aparat pusat dan daerah dalam merumuskan program dan kebijakan, menyajikan data dan informasi ketersediaan pangan secara berkelanjutan sebagai bahan evaluasi dan penyusunan kebijakan, memantau ketersediaan pangan pada hari-hari besar nasional dan keagamaan, memprognosa ketersediaan pangan pokok, serta mengkoordinasikan program pengelolaan produksi dan cadangan pangan. Selain itu, aparat pusat juga melakukan kajian staf untuk memecahkan permasalahan pangan yang berkembang serta melaksanakan advokasi ke daerah dalam rangka peningkatan kualitas analisis ketersediaan pangan, serta merumuskan cadangan pangan pemerintah dan masyarakat terutama di daerah rawan pangan. Pemantauan dan analisis ketersediaan pangan dilakukan melalui penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM) nasional dan memfasilitasi penyusunan Neraca Bahan Makanan provinsi dan kabupaten/kota.

b. Ketersediaan Informasi Pasokan, Harga dan Akses Pangan di Daerah

Distribusi dan pasokan yang merata ke seluruh wilayah sepanjang waktu dengan harga yang terjangkau oleh daya beli, sangat penting dalam upaya pemenuhan kebutuhan pangan rumah tangga dalam jumlah yang cukup dan mutu yang baik. Pemerataan pasokan pangan nasional sangat dipengaruhi oleh antara lain beragamnya kondisi sumber daya alam, yang menyebabkan perbedaan dalam kemampuan memproduksi bahan pangan wilayah. Hasil perbandingan antara pasokan energi perkapita dari produksi 9 komoditas bahan pangan, dengan angka kecukupan konsumsi energi perkapita suatu wilayah (kabupaten) diperoleh bahwa kondisi pasokan pangan antara tahun 2012-2016 mengalami perkembangan ke arah semakin cukup.

Untuk memenuhi kebutuhan pangan bagi wilayah yang mempunyai kondisi pasokan rendah dan sangat rendah, seperti daerah kepulauan dan perbatasan diperlukan tambahan pasokan dari wilayah lain yang mengalami surplus, atau dari bahan pangan impor. Wilayah yang mempunyai pasokan rendah, pada umumnya mempunyai akses terhadap pangan kurang baik, karena kurangnya sarana dan prasarana transportasi, seperti jalan, angkutan darat, angkutan sungai, dan angkutan udara. Akibatnya masyarakat di wilayah tersebut sangat rentan terhadap masalah kerawanan pangan.

Stabilisasi harga pangan mempunyai tujuan ganda, yaitu untuk mengamankan pasokan pangan pokok masyarakat oleh produsen, dan mengamankan konsumsi pangan oleh konsumen dengan harga terjangkau. Dalam rangka mengendalikan tingkat harga pangan pokok terutama beras dipasaran, maka diadakan kegiatan diantaranya pemberian dana talangan P-LDPM (Penguatan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat) yang dibiayai oleh APBN. Adapun tujuan pengucuran dana tersebut adalah:

- a. Memperkuat modal usaha gapoktan dan unit usaha yang dikelola (distribusi/pemasaran dan cadangan pangan).
- b. Untuk dapat mengembangkan sarana penyimpanan, melakukan pembelian hasil produksi petani anggotanya dan tersedianya cadangan pangan disaat menghadapi musim paceklik (kemarau panjang) serta tercapainya stabilitas harga ditempat petani saat panen raya.
- c. Mengembangkan usaha ekonomi di wilayah dengan melakukan musyawarah rencana kegiatan bersama anggota kelompoknya, melakukan pembelian, penyimpanan, pengolahan, pemasaran sesuai rencana, kebutuhan anggota, kebutuhan pasar serta mempunyai nilai tambah bagi khususnya unit usaha gapoktan yang mengelolanya.
- d. Memperluas jaringan kerjasama pemasaran yang saling menguntungkan dengan mitra usaha didalam maupun diluar wilayahnya.

Tabel Perkembangan Harga GKP, GKG Di Tingkat Petani Tahun 2011 – 2015

No	Komoditas	Satuan	2011	2012	2013	2014	2015
1.	Gabah Kering Panen (GKP)	Rp/kg	2.800	3.000	3.600	4.338	4.400
2.	Gabah Kering Giling (GKG)	Rp/kg	3.000	3.200	3.800	4.903	5.500

Selain harga gabah yang semakin stabil, pada periode 2011-2015, harga beras juga semakin stabil. Stabilitasnya harga gabah dan beras pada periode 2011-2015, antara lain disebabkan adanya kebijakan perberasan yang mampu mengisolasi pengaruh fluktuasi harga internasional. Perkembangan harga di tingkat Konsumen sejak tahun 2011-2015, tertera dibawah ini

Tabel. Perkembangan Harga Di Tingkat Konsumen Tahun 2011 – 2015

Tahun	Beras	Jagung Pipilan	Kedelai	Daging Sapi	Daging Ayam	Telur Ayam Ras	Minyak Goreng	Gula Pasir	Cabe Merah
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
2011	8.212	5.154	7.231	85.962	25.654	1.000	10.529	10.962	29.096
2012	8.212	5.154	7.231	85.962	25.654	1.000	10.529	10.962	29.096
2013	9.283	2.846	9.173	104.712	27.750	1.500	10.317	11.837	31.808
2014	9.590	8.375	11.146	135.625	26.083	1.335	12.365	11.396	36.625
2015	10.000	9.000	11.000	140.000	27.133	1.376	11.947	11.941	37.025

Dari tabel diatas menunjukkan harga di tingkat konsumen tahun 2011–2015 relatif stabil, namun untuk daging sapi dari tahun 2013 sampai dengan 2015 mengalami kenaikan

c. Penanganan Daerah Rawan Pangan

Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi penanganan kerawanan pangan dan pengurangan kemiskinan di perdesaan, Dinas Ketahanan Pangan berdasarkan data dari kecamatan dan BPS serta data ulang oleh bidang Ketahanan Pangan sampai dengan tahun 2010 yang mengacu pada KK miskin diatas 30% yaitu ada 1 Kecamatan dan 4 Desa, Desa ini merupakan daerah rawan pangan dan dapat ditindaklanjuti dengan kegiatan pemberdayaan Desa Mandiri pangan, peningkatan Kegiatan Ketahanan Pangan, Pengembangan Ketersediaan dan Penanganan Rawan Pangan, Pembinaan Replikasi untuk kegiatan Desa Mandiri Pangan dapat diusahakan bantuan modal usaha dengan besaran lebih kurang 100 juta rupiah. Data desa mandiri pangan dan afinitas dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel Data Desa Mandiri Pangan dan Afinitas yang dibina Tahun 2011 – 2015

No	Jenis Kegiatan	Tahun					Keterangan
		2011	2012	2013	2014	2015	
1	Desa Mapan (desa)	2	2	2	2	2	Desa Semau dan Bram Itam Raya
2	Jumlah kelompok afinitas (kelompok)	13	13	13	13	13	- Usaha Tani Bersatu - Sehati - Mekar Sari - Kenanga - Bina Karya - Usaha Bersama - Kelompok I - Kelompok II - Kelompok III - Kelompok IV - Kelompok V - Kelompok VI - Kelompok VII
3	Dana Bansos (Rp.000)		100.000				

Upaya integrasi kelembagaan lumbung pangan di daerah miskin dan rawan pangan pada lokasi Desa Mandiri Pangan, dilaksanakan melalui pemberdayaan lumbung pangan untuk mengantisipasi rawan pangan dengan jumlah sasaran sebanyak 2 lumbung di 2 desa pada tahun 2015. Sedangkan untuk meningkatkan kemampuan antisipasi kondisi rawan pangan dan penanganan rawan pangan, dilaksanakan melalui Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG) serta intervensi melalui Penanganan Daerah Rawan Pangan (PDRP). Pada tahun 2015, PDRP dilaksanakan di 4 Desa yang tersebar pada 2 kecamatan. Keberhasilan program tersebut dijadikan model pengembangan peningkatan pendapatan petani kecil sekaligus ketahanan pangan keluarganya pada pelaksanaan pembangunan pertanian, termasuk pengembangan Desa Mandiri Pangan.

d. Penguatan Cadangan Pangan

Mengacu Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002, bahwa cadangan pangan nasional terdiri dari cadangan pangan pemerintah dan cadangan pangan masyarakat. Cadangan pangan pemerintah adalah cadangan pangan tertentu bersifat pokok di tingkat nasional sebagai persediaan pangan pokok tertentu, misalnya beras, sedangkan di tingkat daerah dapat berupa pangan pokok masyarakat di daerah setempat. Cadangan pangan pemerintah pusat dijadikan sebagai stok beras nasional dan dikelola oleh PERUM Bulog. Total pengadaan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) tahun 2011-2015 rata-rata sekitar 637.075 ton, dimanfaatkan untuk bantuan darurat akibat bencana.

Dalam rangka mengatasi gejolak harga pangan dan bencana alam sertaantisipasi masa paceklik, Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat bekerja sama dengan Bulog untuk antisipasi masa paceklik atau bencana alam. Sampai saat ini Cadangan Pangan Pemerintah Daerah yang dititipkan di perum Bulog sebanyak 43,777 ton.

Pengembangan cadangan pangan masyarakat, dilakukan melalui pengembangan lumbung pangan masyarakat terutama pada lokasi yang rawan bencana dan terpengaruh masa paceklik. Kelembagaan tersebut dibangun berkelompok dengan membangun dan mengembangkan cadangan pangan masyarakat berupa lumbung pangan. Untuk tahun 2015, kegiatan pemberdayaan lumbung pangan dilakukan di lokasi Desa Mandiri Pangan. pemberdayaan lumbung pangan dilaksanakan melalui penggunaan dan pemanfaatan DAK bidang pertanian. Dana yang disediakan untuk lumbung pangan dimanfaatkan untuk pembangunan fisik lumbung pangan dengan kapasitas simpan minimal 20 ton beserta lantai jemur.

e. Skor Pola Pangan Harapan (PPH)

Berdasarkan hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas), rata-rata konsumsi pangan perkapita perhari penduduk selama periode 2011-2015 mengalami fluktuasi dan cenderung meningkat sampai tahun 2015

Tabel Perkembangan Konsumsi Energi dan Protein Penduduk Kabupaten Tanjung Jabung Barat Perkapita Perhari dan skor PPH Tahun 2011-2015

Uraian	Perkembangan Konsumsi Perkapita Perhari					Pertumbuhan (%)
	2011	2012	2013	2014	2015	
1. Energi (kkal/kap/hari)	2.158	2.090	1.958	1.947	2.249	1,16
2. Protein (gram/kap/hari)	57,7	54,6	53,5	55,9	60,0	1.04
Skor PPH	89,7	83,3	79,7	81,2	83,9	1,02

Sumber : diolah DKP

Secara nasional, kualitas (keragaman dan keseimbangan) konsumsi pangan penduduk yang ditunjukkan dengan nilai skor Pola Pangan Harapan (PPH) mengalami penurunan dari 89,7 pada tahun 2012, menjadi 83,3 pada tahun 2013, dan turun menjadi 79,7 pada tahun 2015. kenaikan kualitas konsumsi pangan yang cukup memadai pada tahun 2015, disebabkan meningkatnya konsumsi seluruh jenis komoditas pangan dalam 9 kelompok bahan pangan, kecuali minyak sawit dan minyak lainnya dari kelompok minyak dan lemak serta konsumsi minuman. Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pembinaan konsumsi pangan, melalui Dinas Ketahanan Pangan tahun 2011-2015 telah dilakukan Gerakan Penganekaragaman Konsumsi Pangan, diarahkan untuk memotivasi masyarakat dalam melakukan konsumsi pangan beragam, bergizi Seimbang dan Aman (B2SA).

f. Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan

Seiring dengan semakin meningkatnya kesadaran masyarakat akan makanan yang sehat, penanganan keamanan pangan menjadi salah satu aspek penting yang menjadi perhatian masyarakat. Merembaknya berbagai kasus keracunan akibat mengkonsumsi pangan olahan dan pangan segar, serta merembaknya permasalahan keamanan pangan lainnya dalam beberapa tahun terakhir, telah menyadarkan dan meningkatkan kepedulian berbagai elemen pemerintah dan masyarakat untuk menelaah dan mengkaji lebih lanjut dan lebih mendalam tentang berbagai penyebabnya. Kasus keracunan karena makanan (*foodborne diseases*) sering terjadi di berbagai daerah. Menurut Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM), kasus keracunan pangan terbagi dalam 3 (tiga) kelompok antara lain sumber Pangan, tempat/lokasi kejadian, dan penyebab keracunan.

Sesuai Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu, dan Gizi Pangan; bahwa pemerintah menetapkan persyaratan mutu dan keamanan pangan produk pertanian dalam negeri maupun impor, khusus keamanan pangan segar tanggung jawabnya diserahkan kepada Kementerian Pertanian. Apabila hal tersebut tidak dilakukan, maka: (1) Indonesia akan kebanjiran produk impor, terutama buah dan sayuran segar yang mutu dan keamanannya kurang jelas; (2) Produk pertanian Indonesia kurang laku dan tidak menjadi pilihan konsumen di dalam negeri dan luar negeri; (3) Daya saing produk semakin rendah; (4) Mematikan petani/produsen dalam negeri; dan (5) Kerugian ekonomi yang semakin besar.

Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi penanganan keamanan pangan, kegiatan program Dinas Ketahanan Pangan difokuskan pada penanganan keamanan pangan segar melalui (a) penguatan kelembagaan dan aparat, dengan memfasilitasi pembentukan dan pemantapan kelembagaan Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah /OKKPD (b) peningkatan kapasitas dan kapabilitas aparat pelaksana (c) pengawasan dan pembinaan keamanan pangan segar untuk petani dan pedagang, serta (d) sosialisasi, promosi dan pelatihan tentang keamanan pangan segar bagi produsen dan konsumen.

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

a. Tantangan

Tantangan yang ada pada Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat adalah :

1. Kabupaten Tanjung Jabung Barat merupakan wilayah yang terdiri dari 13 kecamatan, 114 desa dan 20 kelurahan. Wilayah Kabupaten Tanjung Jabung barat terdiri lahan Pertambangan, Perkebunan dan Pertanian.

2. Kurangnya pelatihan terhadap penyuluhan/pendamping dalam menjalankan setiap program untuk pembinaan masyarakat.
3. Belum terlaksananya dengan baik diversifikasi produksi dan konsumsi pangan.
4. Belum meratanya pengendalian harga gabah pada tingkat petani disaat panenya
5. Masih terdapatnya KK miskin pada desa tertentu yang harus mendapat penanganan daerah rawan pangan
6. Terbatasnya tenaga/sumber daya manusia baik kualitas maupun kuantitasnya khususnya PNS (jumlah PNS hanya 22 Orang)
7. Adanya kecenderungan masyarakat makanan cepat saji dari bahan impor
8. Perilaku masyarakat yang masih cenderung sulit merubah pola makan (pangan alternative yang berasal sumber pangan lokal) dalam hal ini karena kebiasaan sejak kecil.
9. Belum terdistribusinya pegawai sebagaimana mestinya.

b. Peluang.

Peluang yang ada pada Dinas Ketahanan Pangan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat adalah:

1. Tersedianya anggaran yang cukup baik dari APBD II maupun APBN untuk menunjang terselenggaranya kegiatan Diversifikasi Pangan.
2. Adanya koordinasi dengan Badan POM, Dinas Kesehatan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Ketahanan Pangan Daerah dan MUI melakukan berbagai upaya agar terdapat setandar pangan yang sehat serta halal di Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
3. Karangannya masyarakat yang tersedia untuk dilaksanakan penanaman pangan yang lokal yang berkualitas serta dapat meningkatkan pendapatan.
4. Adanya harga pembelian pemerintah yang dilaksanakan oleh Bulok LDPM dan kelompok lumbung masyarakat.
5. Terbentuknya kelompok apinitas pada daerah rawan pangan yang dapat mendorong peningkatan pendapatan masyarakat miskin.
6. Sebagai jalur arus lalu lintas antara provinsi dan kabupaten baik lintas darat, maupun laut.
7. Adanya kebijakan pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Dibidang Perekonomian Melalui Visi Misinya yaitu” Terwujudnya Kabupaten Tanjung Jabung Barat Maju, Adil, Makmur, Bermartabat dan Berkualitas”.
8. Adanya Komitmen Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam Upaya Penuntasan Kemiskinan.
9. Adanya kebijakan Nasional Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan (P2KP) Dan Kawasan Rumah Pangan Lestari (M-KRPL).
10. Tersedianya Teknologi budi daya Informasi dan Komunikasi

11. Adanya Kebijakan Pemerintah bahwa Ketahanan Pangan merupakan urusan wajib.
12. Adanya Kebijakan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam hal Penerapan Perinsip Partisipasi yaitu keterlibatan Masyarakat dalam Perencanaan, Perumusan, Implementasi dan Evaluasi Kebijakan Pembangunan Kabupaten Tanjung Jabung Barat

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Untuk mempertahankan dan meningkatkan keberhasilan pembangunan ketahanan pangan di Kabupaten Tanjung Jabung Barat perlu diwaspadai :

1. Terbatasnya tenaga/ sumber daya manusia baik kualitas maupun kuantitas khususnya Pegawai Negeri Sipil Teknis sehingga kinerja Dinas Ketahanan Pangan daerah belum maksimal sesuai dengan program kerja yang telah di rencanakan.
2. Badan Urusan Logistik tidak bisa menyesuaikan harga dengan harga umum, Karna berdasarkan SK Menteri Pertanian dan Keppres No. 1 tahun 2010 harga gabah dan beras telah melampaui batas lebih tinggi 10% dari Harga Dasar Pemerintah (HPP).
3. Data produksi pangan masih merupakan data agregat kecamatan yang belum rinci sehingga kualitas dan fasilitas hasil analisis/ pelaporan FSVA dan SKPG belum sesuai dengan yang diharapkan.
4. Data Ekspor dan Impor pangan masih terbatas pada data pangan tertentu, dan belum merupakan data pangan secara menyeluruh perkecamatan sehingga sangat menghambat dan penyusunan neraca bahan makanan (NBM) dan analisis ketersediaan pangan wilayah.
5. Data kemiskinan merupakan salah satu indikator untuk mengukur kerawanan pangan.
6. Penanganan daerah rawan pangan khususnya pemberdayaan masyarakat desa miskin belum Maksimal.
7. Sarana dan prasarana untuk keamanan pangan belum ada.
8. Masih rendahnya kepedulian masyarakat tentang keamanan pangan karena terbatasnya pengetahuan dan daya beli terhadap produk pangan yang aman.
9. Masyarakat kurang maksimal memanfaatkan dana Bansos dan bantuan lainnya.

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.

Visi Daerah

Dalam penyusunan renstra (Rencana Strategis) Dins Ketahanan Pangan harus mengacu dan diselaraskan dengan visi, misi dan program Bupati dan wakil Bupati Tanjung Jabung Barat .

Dalam RPJMD 2016-2021 Visi Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat adalah **“terwujudnya Kabupaten Tanjung Jabung Barat Maju, Adil, Makmur, Bermartabat dan Berkualitas”**

Misi Daerah

Misi Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam Mencapai Visi Daerah adalah:

1. Meningkatkan kualitas pelayanan umum melalui pembangunan infrastruktur dasar kawasan ekonomi yang berkualitas.
2. Meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui pendidikan, kesehatan dan pelestarian lingkungan hidup.
3. Meningkatkan pembangunan ekonomi masyarakat melalui agroindustri dan perikanan.
4. Meningkatkan persatuan dan kesatuan bangsa melalui harmonisasi kehidupan beragama dan berbudaya, supremasi hukum dan tata kelola pemerintahan yang baik.

Dari misi Bupati Tanjung Jabung Barat tersebut, yang terkait dan menjadi tugas Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat adalah misi ketiga yaitu : Meningkatkan pendapatan dan perekonomian masyarakat melalui mendorong tumbuhnya industri pengolahan dalam rangka menambah value added, peningkatan pelabuhan perikanan Kuala Tungkal menjadi pelabuhan Nusantara, penyediaan kapal nelayan berukuran besar untuk dapat mengarungi zona ekonomi eksklusif, penyediaan bibit, pupuk dan teknologi pertanian serta peningkatan daya beli masyarakat (Perekonomian).

Oleh karena itu Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat dengan fasilitas dan sumber daya yang memiliki, dan segenap kemampuan yang ada akan berusaha untuk mensukseskan apa yang menjadi misi pimpinan daerah tersebut melalui program kegiatan yang secara langsung mengarah pada visi dan misi Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Tujuan dan Sasaran

Tujuan Pembangunan Daerah

Berdasarkan rumusan Visi dan Misi serta mengacu selaras dengan arahan teknis operasional dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), maka tujuan pembangunan daerah untuk penyelenggara pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan 5 (lima) tahun ke depan adalah:

1. Meningkatkan Pembangunan infrastruktur dasar yang berkualitas.
2. Membangun kawasan khusus produksi dan sentra pengembangan ekonomian.
3. Meningkatkan kualitas hidup masyarakat yang berbasis pada pendidikan yang berkualitas.
4. Peningkatan kualitas hidup masyarakat yang berbasis pada pelayanan kesehatan yang berkualitas.
5. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelestarian lingkungan hidup.
6. Meningkatkan pembangunan ekonomian masyarakat melalui investasi daerah dan daya serap tenaga kerja.
7. Meningkatkan daya saing agroindustri dan perikanan melalui ekonomi kerakyatan.
8. Meningkatkan kualitas tatanan masyarakat dalam beragama dan berbudaya.

9. Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan melalui aparat pemerintahan daerah yang berkualitas dan transparan.
10. Meningkatkan kepastian hukum demokrasi.

Sasaran Pembangunan

Dalam mewujudkan tujuan pembangunan diatas, maka Kabupaten Tanjung jabung Barat menetapkan sasaran pokok pembangunan berdasarkan pada kebutuhan untuk dilaksanakan yakni :

1. Pembangunan jalan dan jembatan yang berkualitas untuk meningkatkan aksesibilitas dan daya saing daerah.
2. Pembangunan pusat pembangkit tenaga dan jejaringan listrik dan pusat pengolahan air bersih bagi seluruh daerah.
3. Pembangunan jaringan telekomunikasi daerah tanpa kabel bagi seluruh daerah terpencil.
4. Meningkatkan system administrasi kearsipan dan layanan informasi daerah.
5. Peningkatan kepustakaan daerah
6. Pembangunan kawasan khusus untuk agroindustri.
7. Pembangunan kawasan khusus produksi untuk sentra tanaman pangan dan perikanan.
8. Pengembangan wilayah administrasi dan tata kelola pemerintahan.
9. Meningkatnya produktifitas Pangan yang disertai dengan peningkatan pendapatan masyarakat.
10. Meningkatnya perekonomian yang sehat dan kondusif.
11. Meningkatnya pengembangan tanaman komoditas perkebunan dan pertanian khususnya tanaman non beras.
12. Terwujudnya pembangunan Ketahanan Pangan Masyarakat yang dinamis.

3.3 Telaahan Renstra Kementerian

Faktor Penghambat

Sebagai faktor penghambat di pelayanan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat berdasarkan sasaran RENSTRA Kementrian :

- a. Kurangnya produksi pangan dan terbatasnya kemampuan dalam penanganan daerah rawan pangan.
- b. Banyaknya instansi yang perlu dilibatkan sehingga biaya operasional tinggi.
- c. Dana terbatas
- d. Budaya masyarakat akan ketergantungan pangan terhadap pangan tertentu sebagai kebutuhan gizi keluarga
- e. Masih rendahnya tingkat pemahaman/kepedulian masyarakat terhadap manfaat dan keamanan pangan yang dikonsumsi.

Faktor Pendorong

Sebagai faktor pendorong di pelayanan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat berdasarkan sasaran RENSTRA Kementrian :

- a. Pengembangan ketersediaan pangan dan pengembangan jasa mandiri pangan.
- b. Bahan pangan yang datang dari daerah lain cukup banyak maupun yang menuju kebatam
- c. Peluang pelaku usaha Agribisnis untuk peningkatan pendapatan terbuka luas dan adanya kerjasama dengan Kota Batam membuka usaha
- d. Adanya regulasi penerapan sistem jaminan untuk mutu dan keamanan pangan

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Kegiatan Dinas Ketahanan Pangan Daerah yang berhubungan dengan rencana tata ruang wilayah dan kajian lingkungan hidup strategis adalah pembangunan lumbung pangan. Pembangunan lumbung pangan ini bertujuan untuk menampung gabah pada waktu musim panen raya (tunda jual) dan menampung gabah antisipasi pada musim-musim tersebut. Pembangunan lumbung pangan Masyarakat dibangun diwilayah/Daerah sentra produksi dan Daerah rawan pangan.

Oleh karena itu lumbung pangan dibangun (lokasi) pada daerah pemukiman sesuai dengan tata ruang wilayah kecamatan/desa. Target pembangunan lumbung pangan sebanyak 8 (delapan) untuk lumbung pangan Masyarakat dan satu buah lumbung pangan pemerintah dalam kurun waktu 5 (lima) tahun yaitu 2016 s/d 2021 penentuan lokasi lumbung dilakukan melalui tahapan-tahapan sebagai berikut:

1. Membuka surat/mengirim surat kecamatan (camat) sebagai calon lokasi lumbung, dimana isi surat dimaksud agar pihak pemerintah Kecamatan dapat memberikan gambaran dimana/lokasi lumbung pangan dibangun.
2. Dari pihak Dinas Ketahanan Pangan Daerah menugaskan staf untuk turun langsung ke lapangan dalam rangka meghimpun informasi dari semua pihak terkait sehubungan dengan akan dibangun lumbung pangan Masyarakat Desa diwilayah ini. Hal ini dimaksud untuk menampung aspirasi Masyarakat. Dengan melalui tahapan-tahapan tersebut sehingga apabila dibangun lumbung tidak bersentuhan dengan kawasan hutan lindung/cagar alam.
3. Dalam hal ini berdirinya bangunan lumbung berdiri di atas lahan yang sesuai dengan Rencana tata ruang Wilayah.

3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis

Isu-isu strategis dalam penyusunan Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat berdasarkan kondisi aktual yang mempengaruhi Ketahanan Pangan dalam jangka waktu beberapa tahun kedepan apabila tidak diantisipasi akan menimbulkan kerugian yang lebih besar.

Permasalahan dalam ketahanan pangan sebagai berikut :

1. Produksi dan kapasitas produksi pangan semakin terbatas karena:
 - a. Konversi lahan pangan ke non pangan.
 - b. Menurunnya kualitas dan kesuburan lahan akibat kerusakan lingkungan.
 - c. Perubahan iklim.
 - d. Lambatnya penerapan teknologi.
 - e. Kurang terawasinya pemotongan ternak betina produktif.
 - f. Adanya gangguan hama dan penyakit.
2. Jumlah permintaan bahan pangan semakin meningkat seiring dengan peningkatan jumlah penduduk, pemenuhan kebutuhan baku industri dan penggunaan pangan.
3. Kerawanan pangan.
4. Ketidakstabilan harga dan rendahnya efisiensi sistem pemasaran hasil-hasil pangan.
5. Kualitas dan kuantitas konsumsi pangan sebagian besar masyarakat masih rendah yang ditandai dengan PPH yang masih rendah.
6. Masih adanya penduduk miskin yang mengakibatkan rendahnya daya beli terhadap bahan pangan.

Strategi Dinas Ketahanan Pangan

Strategi Dinas Ketahanan Pangan dalam melaksanakan pembangunan ketahanan pangan tahun 2016-2021 diarahkan untuk mencapai tujuan dan sasaran dalam pemantapan ketahanan pangan masyarakat dengan mengacu pada penerapan ketujuh gema revitalisasi pembangunan pertanian. Di samping itu, strategi untuk menuju ketahanan pangan dan kemandirian pangan juga mengacu pada “**Lima Prinsip Roma (*Five Rome Principles for Sustainable Global Food Security*)**” yang dihasilkan melalui KTT Pangan tahun 2009, yaitu: (1) Memberikan dukungan dan bantuan internasional kepada negara berkembang untuk menerapkan program-program nasional yang bertujuan untuk membangun sektor pertanian dan mencapai ketahanan pangan; (2) Meningkatkan koordinasi dan kerjasama di tingkat nasional, regional dan internasional dengan seluruh pemangku kepentingan terkait dengan sektor pertanian dan ketahanan pangan; (3) Menerapkan strategi *comprehensive twin-track approach* untuk ketahanan pangan dengan: (a) segera mengambil langkah-langkah jangka pendek untuk membantu kelompok rentan, dan (b) menerapkan kebijakan jangka menengah dan panjang untuk mencapai pembangunan berkelanjutan di sektor pertanian, mencapai ketahanan pangan, dan mengatasi akar permasalahan dari masalah kelaparan dan kemiskinan; (4) Sepakat untuk meningkatkan efisiensi, koordinasi, dan efektifitas badan-badan multilateral yang menangani pertanian dan ketahanan pangan; (5) Meningkatkan investasi dan pendanaan untuk sektor pertanian dan ketahanan pangan, termasuk dengan menempatkan sektor pertanian sebagai prioritas dalam anggaran belanja negara.

Memperhatikan tujuh gema revitalisasi pembangunan pertanian dan Lima Prinsip KTT Pangan Roma tahun 2009 tersebut di atas, maka strategi yang akan ditempuh Dinas Ketahanan Pangan 2016-2021 meliputi:

1. Melaksanakan koordinasi secara sinergis dalam penyusunan kebijakan ketersediaan, distribusi, konsumsi pangan, dan keamanan pangan segar;
2. Mendorong pengembangan cadangan pangan, sistem distribusi pangan, penganeekaragaman konsumsi dan keamanan pangan segar;
3. Mendorong peranserta swasta, masyarakat sipil, dan kelembagaan masyarakat lainnya dalam ketersediaan, distribusi, konsumsi, dan keamanan pangan segar;
4. Menyelenggarakan program aksi pemberdayaan masyarakat dalam memecahkan permasalahan ketahanan pangan masyarakat;
5. Mendorong sinkronisasi pembiayaan program aksi antara APBN, APBD dan dana masyarakat;
6. Memecahkan permasalahan strategis ketahanan pangan melalui mekanisme Dewan Ketahanan Pangan.

Strategis Dinas Ketahanan Pangan tahun 2016-2021, diimplementasikan dalam langkah operasional untuk: (a) pemantapan ketersediaan pangan dan kerawanan pangan; (b) pemantapan sistem distribusi pangan yang efisien dan efektif; (c) pembinaan konsumsi pangan beragam, bergizi dan seimbang pada masyarakat; (d) pembinaan keamanan pangan segar; (e) penguatan kelembagaan ketahanan pangan secara efisien dan efektif; serta (f) peningkatan manajemen ketahanan pangan.

Langkah operasional untuk pemantapan ketersediaan pangan dan kerawanan pangan yaitu:

- a. Mendorong kemandirian pangan melalui swasembada pangan untuk komoditas strategis (beras, jagung, kedelai, daging sapi);
- b. Meningkatkan keragaman produksi pangan berdasarkan potensi sumberdaya lokal/wilayah;
- c. Pemberdayaan masyarakat di daerah rawan pangan melalui pengembangan desa mandiri pangan;
- d. Pemberdayaan lumbung pangan masyarakat di daerah rawan pangan;
- e. Penanganan Daerah Rawan Pangan (PDRP) melalui Revitalisasi Sistem Kewaspadaan Pangan Gizi (SKPG) untuk penanganan kerawanan pangan kronis dan transien.

langkah operasional untuk pemantapan sistem distribusi pangan yang efisien dan efektif, adalah:

- a. Mendorong pembentukan cadangan pangan pokok pemerintah daerah (kabupaten/kota, desa) dan cadangan pangan masyarakat;
- b. Mengembangkan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat di daerah sentra produksi;
- c. Menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan pokok sepanjang tahun dan pangan strategis pada periode khusus/tertentu;

d. Pemantauan harga pangan pada hari besar dan hari keagamaan.

Langkah operasional untuk pembinaan konsumsi pangan beragam, bergizi dan seimbang pada *masyarakat*, adalah:

- a. Sosialisasi, promosi dan edukasi budaya pangan beragam, bergizi, seimbang dan Aman (B2SA), sehat dan halal;
- b. Optimalisasi pemanfaatan lahan pekarangan oleh kelompok wanita tani/dasawisma;
- c. Mendorong pengembangan UKM (Usaha Kecil dan Mikro) industri pangan berbasis tepung-tepungan berbahan baku lokal (non beras, non terigu);

Adapun langkah operasional dalam rangka pembinaan keamanan pangan segar, adalah:

- a. Koordinasi dan sosialisasi pembinaan keamanan pangan segar di tingkat petani dan konsumen;
- b. Pengawasan keamanan pangan segar di tingkat usaha tani dan pasar;
- c. Peningkatan kemampuan kelembagaan dan aparat daerah dalam penanganan keamanan pangan segar.

Langkah operasional untuk penguatan kelembagaan ketahanan pangan secara efisien dan efektif, dilakukan melalui peningkatan peran Dewan Ketahanan Pangan yaitu:

- a. Koordinasi program pembangunan ketahanan pangan lintas sektor dan lintas daerah;
- b. Peningkatan motivasi dan partisipasi masyarakat dalam rangka memantapkan ketahanan pangan;
- c. Koordinasi evaluasi dan pengendalian pencapaian kondisi ketahanan pangan.

Sedangkan langkah operasional dalam rangka peningkatan manajemen ketahanan pangan, dilakukan melalui:

- a. Efisiensi dan efektivitas perencanaan, monitoring dan evaluasi program;
- b. Peningkatan kualitas pelayanan keuangan dan perlengkapan;
- c. Peningkatan kualitas pengelolaan hukum, humas, organisasi dan kepegawaian.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

4.1.1. Tujuan

Tujuan yang hendak dicapai dalam pemantapan ketahanan pangan Tahun 2016 – 2021 yaitu *Meningkatkan daya saing agroindustri dan perikanan melalui ekonomi kerakyatan* dengan cara:

1. Memperkuat penyediaan pangan yang beragam berbasis sumberdaya lokal dan untuk mengantisipasi rawan pangan.
2. Memperkuat sistem distribusi dan stabilitas harga pangan pokok.
3. Meningkatkan sumberdaya pelaku utama/pelaku usaha.
4. Meningkatkan konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang dan aman serta pembinaan dan pengawasan keamanan pangan.

4.1.2. Sasaran

Sasaran yang hendak dicapai dalam pemantapan ketahanan pangan Tahun 2016 - 2021 berdasarkan visi, misi dan tujuan, yaitu *Meningkatnya Ketahanan Pangan melalui Ketersediaan dan Kerawanan Pangan, Distribusi dan Harga Pangan, serta Konsumsi dan Keamanan Pangan*

Adapun Pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah beserta indikator kinerjanya disajikan dalam *lampiran 3 Tabel T-C.25*

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Dalam mengimplementasikan visi, misi, serta tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan diperlukan strategi yang merupakan langkah-langkah untuk merumuskan program indikatif dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Selanjutnya disusun arah kebijakan yang merupakan pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan selama lima tahun (2016 – 2021). Strategi dan arah kebijakan pembangunan ketahanan pangan merupakan rumusan perencanaan komprehensif berdasarkan arah kebijakan tahunan dalam mencapai tujuan dan sasaran dengan efektif dan efisien. Untuk mewujudkan visi Bupati 2016 – 2021 yang dilaksanakan melalui satu misi dan agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran.

Strategi adalah pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai. Strategi Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat adalah:

1. Melaksanakan koordinasi secara sinergis dalam penyusunan kebijakan ketersediaan, distribusi, konsumsi pangan, dan keamanan pangan segar;
2. Mendorong pengembangan cadangan pangan, sistem distribusi pangan, penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan segar;
3. Mendorong peranserta swasta, masyarakat sipil, dan kelembagaan masyarakat lainnya dalam ketersediaan, distribusi, konsumsi, dan keamanan pangan segar;
4. Menyelenggarakan program aksi pemberdayaan masyarakat dalam memecahkan permasalahan ketahanan pangan masyarakat;
5. Mendorong sinkronisasi pembiayaan program aksi antara APBN, APBD dan dana masyarakat;
6. Memecahkan permasalahan strategis ketahanan pangan melalui mekanisme Dewan Ketahanan Pangan.

Kebijakan adalah pedoman yang wajib dipatuhi dalam melakukan tindakan untuk melaksanakan strategis yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran serta dengan memaksimalkan segala kekuatan menyembunyikan kelemahan untuk mengisi/memanfaatkan semua peluang dalam upaya mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Kebijakan yang ditetapkan dalam Renstra Dinas Ketahanan Pangan Daerah Kabupaten Tanjung Barat adalah :

1. Memberikan bantuan kepada kelompok afinitas dan penguatan kawasan/desa mandiri pangan.
2. Pengembangan sistem distribusi dan harga pangan secara berkala.

3. Memberikan bantuan cadangan pangan pemerintah daerah dan bantuan cadangan pangan masyarakat.
4. Optimalisasi pemanfaatan lahan pekarangan dan melakukan promosi konsumsi pangan lokal (umbi-umbian), sayuran, dan buah-buahan serta pangan hewani.
5. Memberikan bantuan bibit pekarangan untuk peningkatan kualitas konsumsi dan peningkatan pendapatan rumah tangga.
6. Penguatan pengawasan mutu dan pembinaan keamanan pangan segar
7. Penguatan system informasi ketahanan pangan secara berkala.

Adapun rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah Dinas Ketahanan Pangan dalam lima tahun mendatang dapat dilihat pada *lampiran 4 Tabel T-C.26*

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Sebagai perwujudan dari beberapa strategi dan kebijakan dalam rangka mencapai setiap misi, maka langkah operasional harus dituangkan ke dalam program dan kegiatan indikatif yang mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan memperhatikan dan mempertimbangkan tugas dan fungsi Dinas Ketahanan Pangan Daerah Kabupaten Tanjung Barat. Dengan demikian kegiatan merupakan penjabaran lebih lanjut dari suatu program sebagai arah dari pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang merupakan kontribusi bagi pencapaian visi dan misi organisasi. Kegiatan merupakan aspek operasional dari suatu rencana strategis yang diarahkan untuk memenuhi sasaran, tujuan, dan misi organisasi. Sementara itu yang dimaksud dengan Indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan suatu program dan kegiatan, baik kuantitatif maupun kualitatif yang secara khusus dinyatakan sebagai pencapaian tujuan yang dapat menggambarkan skala atau tingkat yang digunakan sebagai alat kegiatan pemantauan dan evaluasi, baik kinerja input, proses, output, outcomes maupun impacts sesuai dengan sasaran rencana program dan kegiatan.

Program dan Kegiatan Dinas Ketahanan Pangan

Program yang dilaksanakan oleh Dinas Ketahanan Pangan sesuai dengan visi dan misi, tugas pokok dan fungsinya serta memperhatikan permasalahan dan potensi ketahanan pangan adalah **“Program Peningkatan Diversifikasi Pangan dan Ketahanan Pangan Masyarakat”**

Sasaran program (outcome) yang hendak dicapai dalam program tersebut adalah meningkatnya ketahanan pangan melalui konsumsi dan keamanan pangan segar, ketersediaan pangan, distribusi pangan dan pemberdayaan ditingkat masyarakat, serta terkoordinasinya kebijakan ketahanan pangan. Adapun indikator program (outcome) yaitu: (1) Terdiversifikasinya skor PPH Konsumsi; (2) Tersedianya data tentang Neraca Bahan Makanan; (3) Tersedianya peta ketahanan dan kerentanan pangan, serta (4) Terpenuhinya cadangan pangan daerah.

Berdasarkan tugas pokok dan fungsi lingkup Dinas Ketahanan Pangan, Program Peningkatan Diversifikasi dan Pangan Masyarakat dijabarkan dalam 3 (tiga) kegiatan prioritas nasional dan bidang serta 1 (satu) kegiatan pendukung, yaitu (1) Pengembangan ketersediaan pangan dan penanganan kerawanan pangan, (2) Pengembangan sistem distribusi dan stabilitas harga pangan, (3) Pengembangan penganekaragaman konsumsi pangan dan peningkatan keamanan pangan segar, serta (4) Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya pada Dinas Ketahanan Pangan.

Adapun cakupan kegiatan dari program Peningkatan Diversifikasi Pangan dan Ketahanan Pangan Masyarakat adalah sebagai berikut:

1. Analisis dan penyusunan pola konsumsi dan suplai pangan
2. Optimalisasi Pemanfaatan Pekarangan untuk Pengembangan Pangan (P2KP-KRPL)

3. Pelatihan pengolahan pangan lokal
4. Sosialisasi Mutu dan Keamanan Pangan
5. Sosialisasi Peningkatan dan Pengembangan Promosi Percepatan Penganekaragaman Pangan B2SA
6. Lomba Cipta Menu Beragam Bergizi Seimbang dan Aman
7. Sosialisasi Peningkatan Penanganan Keamanan Pangan Segar Tingkat Produsen dan Konsumen
8. Pengembangan Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan
9. Pengawasan Keamanan dan Mutu Pangan
10. Pemberdayaan Desa Mandiri Pangan
11. Peningkatan Peranan Wanita Keluarga Sehat dan Sejahtera (P2WKSS)
12. Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi
13. Analisis Keterersediaan Pangan
14. Penyusunan Peta Ketahanan Pangan dan Kerentanan Pangan
15. Pembinaan Gapoktan Penerima Dana Bansos P-LDPM
16. Operasional Dewan Ketahanan Pangan (DKP)
17. Penyusunan NBM (Neraca Bahan Makanan)
18. sosialisasi dan Pembinaan Pengembangan usaha Pangan masyarakat (PUPM) ,melalui Toko Tani Indonesia (TTI)
19. Pembinaan Kelompoktani Pengelola Lumbung Pangan Masyarakat
20. Pengembangan Cadangan Pangan Daerah
21. Pencatatan dan Pemantauan Stock Beras
22. Monitoring stabilitasi pasokan dan harga pangan pokok
23. Bansos Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (LDPM)
24. Bansos Pengembangan Usaha Pangan Masyarakat (PUPM)
25. Pembangunan Lumbung Pangan/Gudang dan Lantai Jemur
26. Kawasan Mandiri Pangan yang Diberdayakan
27. Peningkatan akses pangan masyarakat
28. Pertemuan Pengurus dan Sosialisasi HKTI
29. Pencatatan dan Pemantauan Distribusi Harga Pangan
30. Pameran Expo Tingkat Nasional
31. Musrenbang Ketahanan Pangan
32. Pembinaan Desa Mandiri Pangan dan Desa Replikasi
33. Penanganan Pasca Panen dan Pengolahan Hasil Pertanian/Pembangunan Lantai Jemur
34. Rehabilitasi LPM
35. Pengadaan Cadangan Beras
36. Pelatihan Petani, Pelaku Agribisnis /Pelatihan Management Kelommpok PUPM
37. Sosialisasi Kelembagaan Agribisnis
38. Identifikasi Sumberdaya Pangan

Pendanaan Indikatif

Mengacu pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) berdasarkan rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dari tahun 2016 s/d 2021 .Sementara itu untuk uraian target Indikator kinerja Perogram dan kegiatan serta besaran pagu pendanaan indikator dapat dilihat pada matrik Program dan Kegiatan dari tahun 2016 s/d 2021 pada *lampiran 5 Tabel TC-27*.

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator merupakan tolak ukur yang digunakan untuk mengevaluasi keadaan suatu kegiatan atau Organisasi yang menunjukkan sejauh mana posisi suatu kegiatan atau Organisasi tersebut berada dalam mencapai tujuan. Indikator dari Program Peningkatan Ketahanan Pangan Daerah adalah penurunan cakupan rumah tangga miskin pada desa miskin.

Tingkat Indikator Kinerja Program Kegiatan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat tahun 2016-2021, adalah Terlaksananya Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat. Semenetera itu untuk indikator kinerja Perangkat Daerah Yang Mengacu Kepada Tujuan dan Sasaran RPJMD dapat dilihat pada *lampiran 6 tabel T-C.28*.

BAB VIII

P E N U T U P

Sebagai bagian dari perencanaan pembangunan pertanian Kementerian Pertanian, tujuan dan sasaran pembangunan Dinas Ketahanan Pangan tahun 2016 – 2021 akan diwujudkan melalui kegiatan prioritas nasional dan bidang yaitu: (1) Pengembangan Ketersediaan Pangan dan Penanganan Kerawanan Pangan; (2) Pengembangan Sistem Distribusi dan Stabilitas Harga Pangan; (3) Pengembangan Penganekaragaman Konsumsi Pangan dan Peningkatan Keamanan Pangan segar; sedangkan kegiatan pendukungnya adalah Dukungan Manajemen dan Teknis lainnya.

Disadari bahwa untuk mencapai pembangunan ketahanan pangan tidaklah mudah, namun dengan tekad dan kerjasama lingkup Dinas Ketahanan Pangan di Provinsi dan Daerah, serta koordinasi dengan instansi terkait, akan dapat tercapai tujuan dan sasaran pembangunan ketahanan pangan. Implementasi Renstra Perubahan Dinas Ketahanan Pangan tahun 2016 – 2021 pada tahapan perencanaan pembangunan ketahanan pangan tahunan, masih dimungkinkan mengalami perbaikan dan penyempurnaan karena terjadinya perubahan kebijakan, permasalahan, dan hasil evaluasi dalam pelaksanaan program pembangunan ketahanan pangan.

Dengan melaksanakan Renstra Perubahan ini sangat diperlukan adanya partisipasi, semangat, dan komitmen dari seluruh aparatur Dinas Ketahanan Pangan Daerah, karena akan menentukan suatu keberhasilan program dan kegiatan yang telah direncanakan. Dengan demikian Renstra Perubahan ini nantinya bukan hanya sebagai Dokumen administrasi saja, karena secara substansi merupakan pencerminan tuntunan pembangunan yang memang dibutuhkan oleh Stakeholders dan merupakan suatu tujuan yang hendak dicapai.

Akhir kata semoga Rencana Strategis Perubahan Dinas Ketahanan Pangan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat ini dapat diimplementasikan dengan baik sesuai dengan tahapan - tahapan yang ditetapkan secara konsisten dalam rangka mendukung terwujudnya pemerintah yang bersih dan berkeseningambungan.

Kepala Dinas Ketahanan Pangan
Kabupaten Tanjung Jabung Barat



H. ISUMAR, S.IP

Pembina Tk. I

NIP. 19660413 198708 1 001

LAMPIRAN TABEL
RENCANA STRATEGIS
2016-2021
DINAS KETAHANAN PANGAN

**Tabel T-C.24 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah
DINAS KETAHANAN PANGAN
Kabupaten Tanjung Jabung Barat**

Uraian	Anggaran Pada Tahun ke- (000)					Realisasi Anggaran pada Tahun ke- (000)					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke					Rata-rata Pertumbuhan	
	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Peningkatan Ketahanan Pangan	1.342.760	2.910.057	2.313.797	3.722.114	2.362.433	1.222.602	2.125.838	1.263.856	2.928.387	2.129.078	91,05	73,05	54,62	78,68	90,12	2.530.232	1.933.952

**Tabel T-C.25 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah
Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat**

No	Tujuan	Sasaran	Indikator/ Sasaran	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun ke-					
				1	2	3	4	5	6
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Meningkatkan daya saing agroindustri dan perikanan melalui ekonomi kerakyatan	Meningkatnya Ketahanan Pangan melalui Ketersediaan dan Kerawanan Pangan, Distribusi dan Harga Pangan, serta Konsumsi dan Keamanan Pangan dan konsumen	- Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi masyarakat (Skor PPH)	75,00	78,00	80,00	82,00	85,00	87,00
2			- Jumlah Ketersediaan Cadangan Pangan Daerah (ton beras)	30	30	35	50	55	60

**Tabel T-C.26 . Tujuan, Sasaran, Strategi, dan kebijakan
Kabupaten Tanjung Jabung Barat**

Visi	Terwujudnya Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Adil, Makmur, Bermartabat dan Berkualitas		
Misi 3	Meningkatkan Pembangunan Ekonomi Masyarakat Melalui Agroindustri dan Perikanan		
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan daya saing agroindustri dan perikanan melalui ekonomi kerakyatan	Meningkatnya Ketahanan Pangan melalui Ketersediaan dan Kerawanan Pangan, Distribusi dan Harga Pangan, serta Konsumsi dan Keamanan Pangan dan konsumen	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan koordinasi secara sinergis dalam penyusunan kebijakan ketersediaan, distribusi, konsumsi pangan, dan keamanan pangan segar; 2. Mendorong pengembangan cadangan pangan, sistem distribusi pangan, penganeekaragaman konsumsi dan keamanan pangan segar; 3. Menyelenggarakan program aksi pemberdayaan masyarakat dalam memecahkan permasalahan ketahanan pangan masyarakat; 4. Mendorong peranserta swasta, masyarakat sipil, dan kelembagaan masyarakat lainnya dalam ketersediaan, distribusi, konsumsi, dan keamanan 5. Mendorong sinkronisasi pembiayaan program aksi antara APBN, APBD dan dana masyarakat; 6. Memecahkan permasalahan strategis ketahanan pangan melalui mekanisme Dewan Ketahanan Pangan. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengembangan sistem distribusi dan harga pangan secara berkala. 2. Memberikan bantuan cadangan pangan pemerintah daerah dan bantuan cadangan pangan masyarakat. 3. Memberikan bantuan kepada kelompok afinitas dan penguatan kawasan/desa mandiri pangan. 4. Optimalisasi pemanfaatan lahan pekarangan dan melakukan promosi konsumsi pangan lokal (umbi-umbian), sayuran, dan buah-buahan serta pangan hewani. 5. Memberikan bantuan bibit pekarangan untuk peningkatan kualitas konsumsi dan peningkatan pendapatan rumah tangga. 6. Penguatan pengawasan mutu dan pembinaan keamanan pangan segar 7. Penguatan sistem informasi ketahanan pangan secara berkala.

**RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN PENDANAAN DINAS KETAHANAN PANGAN
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT**

TUJUAN	SASARAN	KODE	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						2016		2017		2018		2019		2020		2021		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
Terwujudnya Budaya Kerja dan Etos kerja Aparatur yang Akuntabel dan Produktif	Peningkatan Penataan SDM, Pelayanan administrasi dan Kinerja Aparatur	3	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Berjalannya pelayanan administrasi perkantoran dengan lancar (Bulan)	12 bulan	12 bulan	216.144.000	12 bulan	286.005.035	12 bulan	444.757.610	12 bulan	881.400.000	12 bulan	670.600.000	12 bulan	994.000.000	12 bulan	3.492.906.645	DKP	Tanjung Jabung Barat
			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya benda pos untuk kelancaran administrasi	300 lbr	300 lbr	1.350.000	300 lbr	1.350.000	300 lbr	1.350.000	300 lbr	1.500.000	300 lbr	1.600.000	300 lbr	1.700.000	1800 lbr	8.850.000	DKP	Tanjabbar
			Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik (Bulan)	12 Bln	12 Bln	43.200.000	12 Bln	27.000.000	12 Bln	33.000.000	12 Bln	36.000.000	12 Bln	21.000.000	12 Bln	40.000.000	12 Bulan	200.200.000	DKP	Tanjung Jabung Barat
			Penyediaan Jasa administrasi Keuangan	Jumlah pembayaran jasa administrasi keuangan (total Bulan)	130 bln	130 Bln	65.400.000	130 Bln	68.300.000	178 Bln	81.600.000	178 Bln	72.000.000	178 Bln	74.000.000	178 Bln	76.000.000	972 bulan	437.300.000	DKP	Tanjung Jabung Barat
			Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah Pembelian Sarana Jasa Kebersihan Kantor (Pcs)	97 pcs	97 pcs	2.006.000	97 pcs	7.874.785	200 pcs	8.000.000	82 pcs	8.500.000	97 pcs	9.000.000	97 pcs	10.000.000	670 Pcs	45.380.785	DKP	Tanjabbar
			Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah Pembelian Alat Tulis Kantor (Pcs)	1200 pcs	1200 pcs	16.988.000	1900 pcs	44.280.250	1900 pcs	44.280.250	1900 pcs	46.000.000	1900 pcs	47.000.000	1900 pcs	48.000.000	10700 Pcs	246.548.500	DKP	Tanjabbar
			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang cetakan (buah) dan Penggandaan (lembar)	-	-	-	-	-	12 Buah / 20.000 lbr	9.200.000	12 Buah / 20.000 lbr	5.500.000	12 Buah / 20.000 lbr	6.000.000	12 Buah / 20.000 lbr	6.000.000	48 buah/ 80.000 lbr	26.700.000	DKP	Tanjung Jabung Barat
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Pembelian Komponen Instalasi Listrik (Pcs)	-	-	-	-	-	113 pcs	3.500.000	113 pcs	3.800.000	113 pcs	3.800.000	115 pcs	4.000.000	454 Pcs	15.100.000	DKP	Tanjung Jabung Barat
			Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan perundang-undangan	12 Bln	12 Bln	3.000.000	12 Bln	3.000.000	12 Bln	3.000.000	12 Bln	3.600.000	12 Bln	3.700.000	12 Bln	3.800.000	12 Bulan	20.100.000	DKP	Tanjung Jabung Barat
			Penyediaan Makanan dan Minuman	Terlaksananya Kebutuhan Makan dan Minum Harian Rapat	12 Bln	12 Bln	4.200.000	12 Bln	4.200.000	12 Bln	4.200.000	12 Bln	4.500.000	12 Bln	4.500.000	12 Bln	4.500.000	12 Bulan	26.100.000	DKP	Tanjabbar
			Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar daerah	Terlaksananya Perjalanan Dinas Koordinasi dan Konsultasi dengan baik	12 Bln	12 Bln	80.000.000	12 Bln	130.000.000	12 Bln	256.627.360	12 Bln	700.000.000	12 Bln	500.000.000	12 Bln	800.000.000	12 Bulan	2.466.627.360	DKP	Tanjung Jabung Barat
Peningkatan Penataan SDM, Pelayanan administrasi dan Kinerja Aparatur	3	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Kecukupan sarana dan prasarana layak guna Perangkat daerah (Bulan)	12 bulan	12 bulan	124.150.000	12 bulan	153.740.000	12 bulan	257.697.000	12 bulan	250.482.500	12 bulan	270.482.500	12 bulan	257.482.500	12 bulan	1.314.034.500	DKP	Tanjung Jabung Barat	
		Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Terlaksananya Pengadaan peralatan Gedung Kantor (Unit)	7 Unit	10 Unit	20.400.000	7 Unit	38.000.000	7 Unit	90.397.000	15 Unit	70.482.500	10 Unit	70.482.500	10 Unit	70.482.500	59 Unit	360.244.500	DKP	Tanjung Jabung Barat	
		Pemeliharaan rutin/ Berkala gedung kantor	Terlaksananya Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor (paket)	1 Paket	1 Paket	4.000.000	1 Paket	18.000.000	1 Paket	35.000.000	1 Paket	40.000.000	1 Paket	45.000.000	1 Paket	47.000.000	6 Paket	189.000.000	DKP	Tanjung Jabung Barat	
		Pemeliharaan rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional	Terlaksananya Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/Operasional (Total unit pemeliharaan)	11 Unit	11 Unit	87.400.000	16 unit	90.440.000	16 unit	125.000.000	15 unit	130.000.000	15 unit	130.000.000	15 unit	130.000.000	88 Unit	692.840.000	DKP	Tanjung Jabung Barat	
		Pemeliharaan rutin/ Berkala Peralatan Gedung Kantor	Terlaksananya Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor (Unit)	32 Unit	32 unit	12.350.000	32 unit	7.300.000	32 unit	7.300.000	32 unit	10.000.000	32 unit	25.000.000	32 unit	10.000.000	192 Unit	71.950.000	DKP	Tanjung Jabung Barat	
Peningkatan Penataan SDM, Pelayanan administrasi dan Kinerja Aparatur	3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Meningkatnya disiplin aparatur	31 Stel	31 Stel	11.900.000	0	34 stel	14.350.000	41 stel	16.000.000	41 stel	40.000.000	41 stel	40.000.000	188 stel	122.250.000	DKP	Tanjabbar		
		Pengadaan pakaian dinas beserta Perlengkapannya	Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya (Stel)	31 Stel	31 Stel	11.900.000	-	34 stel	14.350.000	41 stel	16.000.000	41 stel	16.000.000	41 stel	40.000.000	41 stel	40.000.000	188	122.250.000	DKP	Tanjung Jabung Barat
Peningkatan Penataan SDM, Pelayanan administrasi dan Kinerja Aparatur	3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	terlaksananya diklat dan SDM	-	100%	20.000.000	0	-	-	-	100%	38.000.000	100%	40.000.000	100%	42.000.000	100%	140.000.000	DKP	Tanjung Jabung Barat	
		Bimtek	Persentase Terpenuhinya Kegiatan dan Pelatiba Formal (%)	-	100%	20.000.000	0	-	-	-	100%	38.000.000	100%	40.000.000	100%	42.000.000	100%	140.000.000	DKP	Tanjung Jabung Barat	

TUJUAN	SASARAN	KODE	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						2016		2017		2018		2019		2020		2021		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
Meningkatkan daya saing agroindustri dan perikanan melalui ekonomi	Meningkatnya Ketahanan Pangan melalui Ketersediaan dan Kerawanan Pangan, Distribusi dan Harga Pangan, serta Konsumsi dan Keamanan Pangan		(Indikator Sasaran / IKU OPD)																		
		Program Peningkatan Diversifikasi dan	Terdiversifikasinya skor PPH Konsumsi	72,00	75,00	889.057.000	78,00	984.324.000	80,00	729.749.000	82,00	2.860.598.000	85,00	3.159.337.500	87,00	3.329.770.450	87,00	11.952.835.950	DKP	Tanjabbar	
			Terpenuhinya Cadangan Pangan Daerah	30 ton beras	30 ton beras	137.700.000,00	30 ton beras	208.665.000	35 ton beras	407.150.000	50 ton beras	1.856.840.000	55 ton beras	2.417.284.000	60 ton beras	2.845.840.000	60 ton beras	7.873.479.000	DKP	Tanjabbar	
			Analisis dan penyusunan pola konsumsi pangan	- Tersusunnya data pola pangan harapan (PPH) Konsumsi pangan (out come) - Tersedianya data Analisis Pola Konsumsi pangan (output)	1 Dokumen	1 Dokumen	115.450.000	1 Dokumen	48.654.000	1 Dokumen	38.654.000	1 Dokumen	145.250.000	1 Dokumen	145.250.000	1 Dokumen	145.250.000	1 Dokumen	638.508.000	DKP	Tanjung Jabung Barat
			Optimalisasi Pemanfaatan Pekarangan untuk Pengembangan Pangan (P2KP-KRPL)	- Meningkatkan Penghasilan dan Gizi Masyarakat Penerima Manfaat (outcome) - Jumlah Kelompok Wanita Tani untuk Pemanfaatan Pekarangan P2KP-KRPL (Output)	7 Kelompok	7 Kelompok	121.100.000	10 Kelompok	151.140.000	10 Kelompok	141.140.000	30 Kelompok	700.000.000	30 Kelompok	710.000.000	30 Kelompok	715.000.000	117 kelompok	2.538.380.000	DKP	Tanjung Jabung Barat
			Pelatihan pengolahan pangan lokal	- Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan IRT tentang pegeatahuan pangan lokal (outcome) - Jumlah IRT yang mengikuti Pengolahan Pangan Lokal (Output)	30 Ibu Rumah Tangga	30 Ibu Rumah Tangga	28.490.000	50 Org IRT	26.050.000	50 IRT	20.050.000	100 IRT	100.000.000	100 IRT	100.000.000	100 IRT	100.000.000	430 IRT	374.590.000	DKP	Tanjung Jabung Barat
			Sosialisasi Mutu dan Keamanan Pangan	- Jumlah tempat sosialisasi mutu dan keamanan pangan (output) - Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan (Outcome)	-	-	-	-	-	-	-	5 Sekolah	100.000.000	6 Sekolah	120.000.000	7 Sekolah	140.000.000	18 sekolah	360.000.000	DKP	Tanjung Jabung Barat
	Sosialisasi Peningkatan dan Pengembangan Promosi Percepatan Penganekaragaman Pangan (B2SA)	- Meningkatkan Pemahaman Masyarakat Tentang Penganekaragaman Pangan (outcome) - Jumlah Kecamatan untuk sosialisasi peningkatan dan pengembangan promosi percepatan penganekaragaman pangan (output)	-	-	-	7 Kecamatan	64.100.000	6 Kec	60.100.000	13 Kecamatan	295.000.000	13 Kecamatan	300.000.000	13 Kecamatan	310.000.000	13 kecamatan	1.029.200.000	DKP	Tanjung Jabung Barat		
		Lomba Cipta Menu Beragam Bergizi seimbang dan aman	- Terlaksananya pelaksanaan kegiatan Lomba Cipta Menu B2SA (output) - Meningkatnya pengetahuan dan keterampilan penyajian menu yang berorientasi B2SA (outcome)	1 Kali/Thn	-	-	1 Kali/Thn	200.125.000	1 Kali	59.025.000	2 Kali/Thn	220.000.000	2 Kali/Thn	220.000.000	2 Kali/Thn	220.000.000	2 kali/tahun	919.150.000	DKP	Tanjung Jabung Barat	
		Sosialisasi Peningkatan Penanganan Keamanan Pangan Segar Tingkat Produsen dan Konsumen (B2SA)	- Jumlah Kegiatan Sosialisasi Pembinaan Pangan Segar yang dikonsumsi masyarakat (output) - penanganan keamanan pangan segar tingkat produsen dan kosumen(outcome)	4 Kali / Tahun	4 Kali/Tahun	156.571.000	-	-	-	4 Kali/Tahun	90.000.000	4 Kali/Tahun	100.000.000	4 Kali/Tahun	100.000.000	4 kali/tahun	446.571.000	DKP	Tanjung Jabung Barat		
		Pengembangan Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan	Meningkatnya optimalisasi pemanfaatan pekarangan untuk pengembangan pangan	-	6 Kelompok	10.000.000	-	-	-	3 Kelompok	90.000.000	3 Kelompok	90.000.000	3 Kelompok	90.000.000	-	280.000.000	DKP	Tanjung Jabung Barat		
		Pengawasan Keamanan dan Mutu Pangan	- Jumlah Kegiatan Pengawasan Keamanan dan Mutu Pangan (output) - Tersosialisasi mengenai mutu dan keamanan pangan segar yang dikonsumsi masyarakat (outcome)	-	-	-	-	-	-	1 Kali/Tahun	50.000.000	1 Kali/Tahun	50.000.000	1 Kali/Tahun	50.000.000	-	150.000.000	DKP	Tanjung Jabung Barat		
		Pemberdayaan Desa Mandiri Pangan	- Jumlah Desa Mandiri Pangan (output) - Terpenuhinya kebutuhan pangan kelompok masyarakat miskin di Desa Mandiri Pangan (outcome)	-	-	-	3 Desa	130.090.000	3 Desa	100.000.000	5 Desa	150.000.000	8 Desa	240.000.000	10 Desa	300.000.000	29 Desa	920.090.000	DKP	Tanjung Jabung Barat	

TUJUAN	SASARAN	KODE	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						2016		2017		2018		2019		2020		2021		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
			Peningkatan Peranan Wanita Keluarga Sehat dan Sejahtera (P2WKSS)	- Jumlah Desa dalam Kegiatan Peningkatan P2WKSS (Output) - Meningkatnya Pengetahuan dan Keterampilan Anggota P2WKSS di Dua Desa (Outcome)	2 Desa.	2 Desa.	62.640.000	2 Desa.	56.200.000	2 Desa	41.730.000	2 Desa.	80.253.000	2 Desa.	80.253.000	2 Desa.	80.253.000	12 Desa	401.329.000	DKP	Tanjung Jabung Barat
			Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi	- Jumlah kecamatan untuk pengambilan data kondisi pangan dan gizi masyarakat (output) - Termonitornya kondisi pangan dan gizi di suatu wilayah (outcome)	-	-	-	13 Kec.	47.440.000	13 Kec.	35.000.000	13 Kec.	220.000.000	13 Kec.	242.000.000	13 Kec.	266.200.000	13 kecamatan	810.640.000	DKP	Tanjung Jabung Barat
			Analisis Keterediaan Pangan	- Jumlah Kecamatan dalam Pengambilan Data Ketersediaan Pangan (output) - Terlaksananya analisis ketersediaan pangan (outcome)	13 Kec.	13 Kec.	73.551.000	13 Kec.	60.475.000	13 Kec.	35.000.000	13 Kec.	159.500.000	13 Kec.	175.450.000	13 Kec.	192.995.000	13 kecamatan	696.971.000	DKP	Tanjung Jabung Barat
			Penyusunan Peta Ketahanan Pangan dan Kerentanan Pangan	- Jumlah Peta tentang Ketahanan dan Kerentanan Pangan (Output) - Tersedianya Data dan Peta situasi pangan dan gizi di wilayah kabupten tanjung jabung barat (Outcome)	1 Peta	1 Peta	62.140.000	-	-	1 Peta	37.000.000	1 Peta	143.000.000	1 Peta	157.300.000	1 Peta	173.030.000	6 Peta	572.470.000	DKP	Tanjung Jabung Barat
			Pembinaan Gapoktan Penerima Dana Bansos P-LDPM	- Jumlah Gapoktan Untuk Pembinaan Pengelolaan LDPM (output) - Meningkatnya nilai tambah produk petani dan anggota pengelola LDPM (outcome)	7 gapoktan	7 gapoktan	61.900.000	7 gapoktan	70.550.000	7 Gapoktan	50.550.000	7 gapoktan	202.140.000	7 gapoktan	242.568.000	7 gapoktan	291.082.000	7 Gapoktan	918.790.000	DKP	Tanjung Jabung Barat
			Operasional Dewan Ketahanan Pangan (DKP)	- Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Rakor Dewan Ketahanan Pangan (Output) - Terlaksananya Rakor DKP Dewan Ketahanan Pangan (Outcome)	2 Kali	2 Kali	85.270.000	2 Kali	78.440.000	2 Kali	73.440.000	2 Kali	95.250.000	2 Kali	95.250.000	2 Kali	95.250.000	12 kali	522.900.000	DKP	Tanjung Jabung Barat
			Penyusunan NBM (Neraca Bahan Makanan)	Jumlah dokumen/ buku neraca bahan makanan NBM	-	-	0	-	-	-	-	1 Dokume	60.000.000	1 Dokumen	70.000.000	1 Dokume	80.000.000	3 Dokumen	210.000.000	DKP	Tanjabbar
			Pengembangan usaha Pangan masyarakat (PUPM)	- Gapoktan yang mengikuti kegiatan sosialisasi dan pembinaan PUPM (Output) - Terbentuknya TTI sebagai lembaga pengembangan pangan masyarakat (PUPM) (Outcome)	-	-	-	1 Gapktan/TTI	76.200.000	2 Gapktan/TTI	125.500.000	3 Gapoktan/TTI	146.460.000	4 Gapoktan/TTI	175.752.000	5 Gapoktan/TTI	210.902.000	15 Gapoktan/TTI	734.814.000	DKP	Tanjung Jabung Barat
			Pembinaan kelompok Tani Pengelola Lumbung Pangan Masyarakat	- Jumlah desa dalam Pembinaan dan Pengembangan Lumbung Pangan (output) - meningkatnya pemahaman kelompok tentang lumbung pangan masyarakat (outcome)	2 Desa	-	-	-	-	-	-	3 Desa	142.560.000	4 Desa	171.072.000	5 Desa	205.286.000	12 Desa	518.918.000	DKP	Tanjung Jabung Barat
			Pengembangan Cadangan Pangan Daerah	- Terpenuhiya Cadangan Pangan Daerah (outcome) - Jumlah cadangan pangan daerah (output)	43 Ton	-	-	-	-	-	-	100 Ton	407.700.000	100 Ton	489.240.000	100 Ton	587.088.000	300 ton	1.484.028.000	DKP	Tanjung Jabung Barat
			Pencatatan dan Pemantauan Stock Beras	- Jumlah kecamatan dalam pemantauan stok beras (output) - Tersedianya data stok beras di tingkat penggilingan padi (outcome)	-	-	-	-	-	11 Kecamatan	75.200.000	11 Kecamatan	82.000.000	11 Kecamatan	87.500.000	11 Kecamatan	93.100.000	11 Kecamatan	337.800.000	DKP	Tanjung Jabung Barat
			Monitoring stabilitasi pasokan dan harga pangan pokok	- terbentuknya satgas pangan kabupaten (outcome) - jumlah kecamatan yang dimonitoring stabilitas pasokan dan harga pangan pokok (output)	-	-	-	-	-	13 Kecamatan	120.500.000	13 Kecamatan	168.500.000	13 Kecamatan	202.176.000	13 Kecamatan	242.611.000	13 kecamatan	733.787.000	DKP	Tanjung Jabung Barat

TUJUAN	SASARAN	KODE	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						2016		2017		2018		2019		2020		2021		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
			Bansos Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (LDPM)	Jumlah Gapoktan yang mendapat bansos untuk Stabilitas Distribusi Harga Pangan di tingkat Petani	7 Gapoktan/ LDPM	-	-	-	-	-	-	1 Gapoktan	210.000.000	1 Gapoktan	210.000.000	1 Gapoktan	210.000.000	3 Gapoktan Baru	630.000.000	DKP	Tanjung Jabung Barat
			Bansos Pengembangan Usaha Pangan Masyarakat (PUPM)	Jumlah Gapoktan yang mendapat bansos untuk Stabilitas Distribusi Harga Pangan di tingkat Petani	-	-	-	-	-	-	-	1 Gapoktan	400.000.000	1 Gapoktan	400.000.000	1 Gapoktan	400.000.000	3 Gapoktan Baru	1.200.000.000	DKP	Tanjung Jabung Barat
			Pembangunan Lumbung Pangan/Gudang dan Lantai Jemur	Terbangunnya Lumbung pangan / gudang distribusi dan cadangan pangan masyarakat/petani	2 LPM	-	-	-	-	-	-	1 Desa	497.150.000	1 Desa	497.150.000	1 Desa	497.150.000	3 Desa	1.491.450.000	DKP	Tanjung Jabung Barat
			Bansos Lumbung Pangan Masyarakat (LPM)	Terwujudnya Pembinaan dan Pengembangan Lumbung Pangan	2 LPM	-	-	-	-	-	-	1 Desa	30.000.000	1 Desa	30.000.000	1 Desa	30.000.000	3 Desa	90.000.000	DKP	Tanjung Jabung Barat
			Kawasan Mandiri Pangan yang Diberdayakan	Meningkatnya jumlah kawasan mandiri pangan untuk peningkatan pendapatan, daya beli masyarakat dan berkembangnya modal usaha kelompok	-	-	-	-	-	-	-	1 Kec.	220.000.000	1 Kec.	250.000.000	1 Kec.	266.200.000	3 Kec.	736.200.000	DKP	Tanjung Jabung Barat
			Peningkatan akses pangan masyarakat	Jumlah desa dalam pembinaan Kegiatan Peningkatan Akses pangan masyarakat (output)	-	-	-	-	-	-	-	1 Desa	137.500.000	1 Desa	151.250.000	1 Desa	166.375.000	3 Desa	455.125.000	DKP	Tanjung Jabung Barat
			Pertemuan Pengurus dan Sosialisasi HKTI	-terlaksananya jadwal pertemuan pengurus HKTI (output), -Terwujudnya Kepengurusan HKTI di Kab. Tanjung Jabung Barat	-	-	1 Kali	32.030.000	1 Kali	32.030.000	-	-	-	-	-	-	-	2 kali	64.060.000	DKP	Tanjung Jabung Barat
			Pencatatan dan Pemantauan Distribusi Harga Pangan	-Jumlah Kecamatan dalam Pencatatan dan Pemantauan Distribusi Harga Pangan (output) - Tersedianya data distribusi harga pangan (outcome)	13 Kec.	13 Kec.	75.800.000	13 Kec.	61.915.000	13 Kec.	35.400.000	13 Kec.	132.480.000	13 Kec.	158.976.000	13 Kec.	190.771.000	13 kecamatan	655.342.000	DKP	Tanjung Jabung Barat
			Pameran Expo Tingkat Nasional	-Jumlah Pameran expo yang diikuti (output), -Promosi Produk Pangan Daerah di Tingkat Nasional (outcome)	1 Kali/Thn	1 Kali/Thn	86.140.000	1 Kali/Thn	89.580.000	1 Kali/Thn	56.580.000	2 Kali/Thn	180.000.000	2 Kali/Thn	274.255.000	2 Kali/Thn	274.255.000	8 kali	960.810.000	DKP	Tanjung Jabung Barat
			Musrenbang Ketahanan Pangan	- Terlaksananya kegiatan Musrenbang Ketahanan Pangan (Output) - Program / Kegiatan Ketahanan Pangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat (Outcome)	1 Kali	1 Kali	40.560.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 Kali	40.560.000	DKP	Tanjung Jabung Barat
			Pembinaan Desa Mandiri Pangan dan Desa Replikasi	- Terlaksananya sosialisasi Desa Mandiri Pangan dan Desa Replikasi (Output) - Meningkatkan kapasitas pendamping, kelompok masyarakat miskin (Outcome)	6 Desa	6 Desa	57.145.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 Desa	57.145.000	DKP	Tanjung Jabung Barat
			Penanganan Pasca Panen dan Pengolahan Hasil Pertanian/Pembangunan Lantai Jemur	-Jumlah Pembangunan Lantai Jemur untuk pasca panen pertanian (output) - Meningkatnya pemanfaatan lumbung pangan masyarakat (Outcome)	-	-	-	-	-	-	-	2 Unit	400.000.000	3 Unit	600.000.000	3 unit	600.000.000	8 Unit	1.600.000.000	DKP	Tanjung Jabung Barat
			Rehabilitasi LPM	- Jumlah bangunan LPM yang diperbaiki sehingga dapat dimanfaatkan (Output) - Meningkatnya pemanfaatan lumbung pangan masyarakat (Outcome)	-	-	-	-	-	-	-	1 Unit	50.000.000	1 Unit	50.000.000	1 Unit	50.000.000	3 Unit	150.000.000	DKP	Tanjung Jabung Barat
			Pengadaan Cadangan Beras	Jumlah cadangan pangan beras milik pemerintah dan masyarakat (Output)	-	-	-	-	-	-	-	100 Ton	900.000.000	100 Ton	900.000.000	100 Ton	900.000.000	300 ton	2.700.000.000	DKP	Tanjung Jabung Barat

TUJUAN	SASARAN	KODE	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi	
						2016		2017		2018		2019		2020		2021		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra				
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
			Pelatihan Petani, Pelaku Agribisnis /Pelatihan Management Kleompok PUPM	- Jumlah Pelaku utama yang mengikuti pelatihan Manajemen kelompok PUPM (output), - Meningkatnya Pengetahuan Keterampilan dan Sikap (PKS) Petani, Kelompok dan Pelaku Usaha Agribisnis Tentang management kelompok usaha agribisnis (outcome)	-	-	-	-	-	-	-	25 Org	75.000.000	50 Orang	150.000.000	75 Orang	225.000.000	150 orang	450.000.000	DKP	Tanjung Jabung Barat	
			Sosialisasi Kelembagaan Agribisnis	- Jumlah kelompok yang mengikuti sosialisasi Kelembagaan Agribisnis (Output) -Terbentuknya Kelembagaan Ekonomi Petani (outcome)	-	-	-	-	-	-	-	20 Org	50.000.000	20 Org	90.000.000	20 Org	150.000.000	60 orang	290.000.000	DKP	Tanjung Jabung Barat	
			Identifikasi Sumberdaya Pangan	-Jumlah Kecamatan yang diidentifikasi Jenis Sumberdaya Pangan (output) Validasi Data Potensi Sumberdaya Pangan di kecamatan (outcome)	-	-	-	-	-	-	-	13 Kecamatan	72.345.000	13 Kecamatan	79.579.500	13 Kecamatan	87.537.450	13 kecamatan	239.461.950	DKP	Tanjung Jabung Barat	
TOTAL APBD							1.398.951.000		1.632.734.035		1.853.703.610		5.903.320.500		6.597.704.000		7.509.092.950					
TOTAL APBN							10.000.000		-		-		2.484.650.000		2.528.400.000		2.559.725.000					

